

Islam Politik di Turki: Kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP)

Weni Nuraeni¹, Alfiatus Sangadah², Muhammad Fakhriz Zaman³

UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: weninuraeni49@gmail.com¹, sngdhalfiatus@gmail.com², fakhrizzaman22@gamil.com³

Article received: 09 April 2025, Review process: 15 April 2025,

Article Accepted: 18 Mei 2025, Article published: 22 Mei 2025

ABSTRACT

The rise of the Justice and Development Party (AKP) in Turkey reflects a major transformation in the country's political landscape, especially in relation to the relationship between political Islam, secularism and democracy. This research aims to analyze the factors driving the AKP's political dominance as well as its impact on the constitutional system in Turkey. Using a literature study method with a qualitative approach, data was collected from various relevant academic sources and analyzed thematically. The results show that strong support for the AKP comes from conservative groups and the Muslim middle class that grew after economic liberalization. Under the leadership of Recep Tayyip Erdoğan, the AKP managed to consolidate power by promoting a conservative-democratic ideology and economic development agenda. However, over time, the party also showed authoritarian tendencies marked by centralization of power, restrictions on press freedom, and the misuse of religious symbols for political purposes. This research confirms that the AKP's success is inseparable from its socio-economic context and adaptive political strategy, but also poses a serious challenge to the principles of democracy and secularism that have long been the foundation of the Turkish republic. The findings make an important contribution to understanding the dynamics of contemporary Islamic politics and its relevance in the context of a secular state where the majority of the population is Muslim

Keywords: AKP, Turkey, Political Islam, Secularism, Democracy, Authoritarianism

ABSTRAK

Kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki mencerminkan transformasi besar dalam lanskap politik negara tersebut, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara Islam politik, sekularisme, dan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong dominasi politik AKP serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan di Turki. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik yang relevan dan dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kuat terhadap AKP berasal dari kelompok konservatif dan kelas menengah Muslim yang tumbuh pasca liberalisasi ekonomi. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, AKP berhasil mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengusung ideologi konservatif-demokrat dan agenda pembangunan ekonomi. Namun, seiring waktu, partai ini juga menunjukkan kecenderungan otoriter yang ditandai dengan sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan pers, dan penyalahgunaan simbol keagamaan untuk kepentingan politik. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan AKP tidak lepas dari konteks sosial-

ekonomi dan strategi politik yang adaptif, namun juga memunculkan tantangan serius bagi prinsip-prinsip demokrasi dan sekularisme yang telah lama menjadi fondasi republik Turki. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik Islam kontemporer dan relevansinya dalam konteks negara sekuler yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kata Kunci: AKP, Turki, Islam Politik, Sekularisme, Demokrasi, Otoritarianisme

PENDAHULUAN

Islam menjalani era dinasti sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dimana pada era saat itu Islam dijadikan landasan dalam bernegara. Genjatan senjata selalu dilakukan oleh beberapa kelompok Islam konservatif, yang mengakibatkan Islam memiliki ketakutan hingga phobia tersendiri pada beberapa kalangan non-Islam. Sistem politik Timur tengah yang identik dengan kekerasan seperti itu ialah ISIS, Taliban, Al-Qaeda dan sebagainya. Maknanya bahwa ajaran Islam yang telah ada ini dirasa kurang relevan ketika dicampuradukkan dengan sistem pemerintahan. Sekularisme ditegakkan secara ketat di Turki, dan bahkan tentara dengan keras menentang gerakan islam di bidang organisasi sosial maupun politik. Para pendukung yang sekuler menghadapi hambatan berat. Gerakan tersebut telah dilumpuhkan dan diharamkan setelah pihak tentera berjaya mengesan komitmen mereka dalam agenda memartabatkan semula Islam di Turki (Syhadha, 2019)

Turki menjadi salah satu negara yang tidak terkecuali menjadi subjek pembahasan seputar hubungan Islam, demokrasi, dan kenegaraan seperti halnya negara-negara Muslim yang lain. Pengalaman Turki benar-benar menunjukkan kekhasannya tersendiri karena menjadi sebuah negara sekular namun pada masa yang sama, berpenduduk majoriti Muslim. Dalam hal ini, entiti-entiti yang mempunyai aspirasi agama sering menjadi tumpuan kerana peranannya dalam mengangkat kepentingan agama dalam urusan negara. (Dzakirin, A, 2012)

Istilah post Islamisme diusulkan oleh Asef Bayat dan Olivier Roy. Dibawah pimpinan presiden Recep Tayyip Erdogan, partai AKP didirikan sebagai upaya menjalankan pemerintahan dengan tetap menggunakan ajaran islam. Hal Dikarenakan Turki menganut sistem *sekulerisme* tanpa batas wajar sepanjang sejarah perjalanannya. Pergaulan bebas dibubarkan, madrasah serta dilarangnya penggunaan symbol keagamaan di muka *public* sudah cukup jelas menjadi sesuatu yang memprihatinkan disana, sekulerisme yang seharusnya digunakan di tubuh pemerintahan negara justru melampaui batas (Rosyad Alfikri et al., 2022)

Kedatangan liberal menjadi salah satu titik terang partai-partai basis Islam terdahulu yang dibubarkan oleh Mahkamah konstitusi Turki. Dimana saat era awal Republik Turki berdiri mereka mendapat kesulitan untuk tampil dalam kancah politik, bahkan pemerintah mempersulit kelompok keagamaan untuk menyampaikan pendapatnya. Pada tahun 1969 didirikanlah partai islam yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan dengan nama Milli Nizam Partisi atau Partai Tatanan Nasional. Namun karena dianggap bertentangan dengan ide sekularisme yang dianut oleh Negara Republik, partai ini dibubarkan atas dasar pertimbangan menggunakan nilai agama sebagai tujuan politik, sehingga kebebasan masyarakat yang mendukung nilai islam Turki dalam berpolitik disempitkan oleh elit sekuler.

Menurut salah satu mantan menteri Turki yang bernama Hüseyin Çelik, Partai Keadilan dan Pembangunan Turki merupakan sebuah partai berhaluan demokratis konservatif terhadap nilai moral dan social. Sejak didirikan pada tahun 2001, AKP telah menjadi kekuatan politik dominan di Turki, memimpin pemerintahan sejak tahun 2002. (HERIONO, 2024)

Dalam beberapa literatur, seperti Artikel yang disusun oleh Wan Kamal Mujani dan Muhammad Khalis Ibrahim dengan judul "Identiti Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Turki di Persimpangan: Parti Islam atau Sekular?" yang membahas terkait mengenai identitas AKP yang masih terus diperdebatkan sampai sekarang. Penulis menjabarkan mengenai ideologi apa yang diadopsi oleh partai ini. Dalam jurnal ditemukan bahwa AKP mengadopsi ideologi konservatif demokrasi. dan menolak eksploitasi agama dalam politik serta memandang sekularisme sebagai prinsip yang harus dipelihara. (MUJANI & IBRAHIM, 2020)

Didalam buku yang berjudul *Secularism and Muslim Democracy in Turkey* yang ditulis oleh Hakan Yavuz dalam Jurnal Keamanan Nasional Vol. III, No. 2 yang di riview oleh Ihsan Ali-Fauzi. Dijelaskan dalam buku mengenai korelasi antara agama (Islam), sekularisme dan demokrasi di Turki dengan teoritis dan empiris. Penulis terlihat menguasai subjek dalam pembahasan ini: Yavuz bahkan mengetahui hal-hal misteri tentang bagaimana seluk-beluk politik Turki. Penulis sangat mengetahui tentang perdebatan teoritis mengenai yang ada ditempat agama dalam demokrasi dan persaingannya dengan sekularisme, Dibalik semua itu, dia sendiri memang orang Turki, sehingga studinya ditopang oleh sumber-sumber utama yang diterbitkan dalam bahasa Turki dan wawancara mendalam dengan banyak narasumber di negara itu. (Annison, 2011)

Ada sector yang mengatakan Demokrat Indonesia itu adalah sebuah kasus yang sangat mungkin karena itu satu-satunya negara yang kita harmonis antara Islam dengan demokrasi untuk di lingkungan keluarga negara-negara Arab itu bentuknya memang sudah negara demokrasi. Misalnya negara Turki atau negara Mesir atau negara Iran. Bukan karena negara apa, tapi kita lihat demokrasi yang diterapkan di negara-negara islam itu sebagian besar semuanya itu demokrasi.

Prosedur menjadi bentuk negaranya yang demokratis tapi didalamnya tetap ada kerajaan monarki. Contoh Turki merupakan negara republik dan negara modern serta negara demokrasi disitu ada multi partai. Tapi kalau kita lihat dulu tentang terakhir, turki itu seperti kerajaan sekarang ini yang bukan dari partai AKP. Erdogan itu menjadi menteri 5 tahun kemudian mecalonkan lagi jadi perdana Menteri 5 tahun, kemudian Erdogan mencalonkan diri jadi presiden dan menang. Kemudian Erdogan pemilu lagi, dan menyalonkan menjadi presiden lagi dan menang lagi, jadi Erdogan ini menjabat 2 periode menjadi Menteri dan 2 periode menjadi presiden.

Pada saat Erdogan menjadi Menteri, bentuk pilkada pada masa Erdogan itu bukan presidensial tapi parlementer. Pada zaman Erdogan berkuasa sebagai perdana Menteri, Perdana Menteri kepala pemerintahannya kepada Menteri bukan presiden karena ada sistem referensial parlementer yang berkekuatan dan kadang itu menjadi pengalaman penting, tapi pada saat dia sudah menjadi perdana

Menteri, kalau dari Presiden kepala negara, bukan Pertama pemerintahan terjadi ketika kecil, jadi yang berkekuatan adalah presiden. pertama itu Republik yang akan membahas materi itu dari mesir 30 tahun lebih tua dan baru ada Pemilu kemarin tahun 2013.

Pemilu 2013 menghasilkan presiden Muhammad torsi itu hasil Pemilu 2013, tapi yang terjadi apa perhatikan beberapa pemilih ini hanya kekuatan. Sebelumnya sampai hari ini yang diberikan kepada kita ini yaitu demokrasi. Demokrasi ini diibaratkan seperti arena yang penuh dengan persaingan dan konflik, akan tetapi berbeda dengan Presiden Indonesi, kalau mereka biasanya berkuasa di atas semua menteri dia berkeluarga, di antara militer dia berkuasa. Semuanya yang menguasai tentang kualitas, tentang bahasa dan sifatnya. Ternyata ini bukan berarti pemimpin tertingginya, tetapi bagaimana saya itu satu pemain ini dan tidak bermuatan negatif atau tidak punya kebijakan untuk kita tekan Israel, tidak begitu dia punya keputusan itu adalah programnya dan ini adalah kuliah misalnya kadang-kadang Republik kuasa yang berkuasa di dunia siapa enggak namanya demokrasi ya Nah makanya tadi benar ya kita.

Pemilu tahun 2013 di Indonesia menandai perjalanan demokrasi yang terus berkembang, namun hasil pemilu tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan presiden sering kali bersifat terbatas dan hanya berlangsung singkat. Berbeda dengan sistem kepresidenan di negara lain seperti Iran, di mana presiden memiliki kewenangan terbatas pada bidang tertentu, presiden Indonesia secara formal memiliki otoritas luas atas seluruh aspek pemerintahan, termasuk menteri dan militer. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan tersebut menghadapi berbagai dinamika politik dan sosial yang kompleks. Hal ini menunjukkan tantangan dan karakteristik unik demokrasi Indonesia yang masih perlu dipahami secara mendalam.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana kekuasaan presiden di Indonesia berjalan dalam konteks demokrasi prosedural yang berkembang, serta bagaimana perbedaan kekuasaan tersebut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan dinamika politik secara keseluruhan. Meskipun telah banyak kajian mengenai sistem demokrasi di Indonesia, masih minim kajian yang secara komprehensif membahas keterbatasan nyata dalam kekuasaan presiden, khususnya dalam hubungannya dengan pengaruh kelompok politik dan dinamika sosial yang ada. Selain itu, analisis mengenai bagaimana sistem tersebut membedakan Indonesia dari negara lain juga masih kurang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran serta keterbatasan kekuasaan presiden dalam sistem demokrasi Indonesia, serta implikasi nyata dari kondisi tersebut terhadap kestabilan politik, efektivitas pemerintahan, dan perkembangan demokrasi di tanah air.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah merumuskan gagasan utama penelitian, kemudian mengumpulkan informasi yang

relevan dari berbagai sumber literatur. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap 20 sumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti kesesuaian dengan topik, kredibilitas penulis, serta status publikasinya dalam jurnal ilmiah atau buku yang diakui secara akademik (Sugiyono, 2016). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi pola-pola, tema, dan kategori yang muncul dari literatur yang ditelaah guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Islam Politik di Turki: Kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), sebagai berikut:

Kebangkitan AKP Politik Turki AKP

memperoleh dukungan terbesarnya di antara para imigran baru di varo, 27 kelompok yang saat ini membentuk pluralitas di daerah perkotaan Turki. Orang-orang ini saleh dan konservatif secara sosial serta tidak tertarik pada partai sekuler baik di sayap kiri maupun sayap kanan. Varo adalah salah satu sumber kekuatan AKP yang paling penting. AKP dengan cekatan memanfaatkan infrastruktur lokal dan jaringan sosialnya yang berkembang dengan baik, yang sebagian besarnya didirikan oleh Partai Kesejahteraan, untuk memperluas dukungan politiknya di antara kaum pekerja miskin di wilayah perkotaan besar di Turki. Faktor-faktor ini, alih-alih daya Tarik Islam, menjelaskan keberhasilan AKP. (Sumantri, 2012)

AKP menyatakan dirinya sebagai partai konservatif demokrat (conservative democracy) dengan pembangunan ekonomi dan penstabilan politik sebagai agenda utamanya. (Recep. T. E, 2010) seperti sedikit kutipan Erdogan (This political party of which I am leader, AK Party, represent a new political style and understanding in Turkish political live) yang artinya Partai politik yang saya pimpin, Partai AK, mewakili gaya dan pemahaman politik baru dalam kehidupan politik Turki. (Alfian, 2014).

Tampak bahwa AKP merupakan partai yang membawa warna baru dalam perpolitikan Turki. Langkah yang ditempuh dalam ideologi konservatif demokrat menjadi pilihan AKP untuk membentuk sebuah aliran politik yang moderat, yang dapat diterima oleh semua kalangan, tidak hanya oleh masyarakat Turki namun juga kepada dunia internasional. (IDIK SAEFUL BAHRI, 2020)

Faktor Kebangkitan AKP

Dalam beberapa dekade terakhir, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turki telah mengalami kebangkitan yang sangat besar, yang telah mengubah lanskap politik negara tersebut. Para pengamat politik di seluruh dunia telah memperhatikan kemenangan telak AKP dalam berbagai pemilihan umum. sebagai pemenang dalam pemilu 2002 dan 2007. Kemenangan dicapai melalui model interaktif hubungan antara elemen struktural, seperti sistem politik dan keadaan ekonomi, dan peran aktor, seperti kemampuan para pemimpin gerakan Islamis

untuk membaca dan menafsirkan kembali tradisi keagamaan mereka untuk menyesuaikannya dengan berbagai tantangan baru, seperti demokrasi. (Amin, 2014)

Yavuz mengatakan bahwa apa yang dia sebut sebagai "revolusi [di kalangan] konservatif" adalah faktor utama yang mendorong kesuksesan AKP. Revolusi ini bermula ketika kalangan borjuis Anatolia, sebagian besar Islamis, muncul pada tahun 1980, dan memanfaatkan liberalisasi ekonomi yang dipromosikan oleh Perdana Menteri Partai Ibu Pertiwi Turgut Özal. Menurut Yavuz, munculnya kelas yang menengah ini adalah faktor penting dalam keberhasilan AKP. Kelas ini mendorong pertumbuhan industri penerbitan (buku dan media Islam, termasuk televisi), yang memungkinkan publik melihat pilihan Islamis. (Zucher, 2003).

Yavuz juga menjelaskan bahwa kalangan borjuis Muslim atas, termasuk para pemimpin AKP, melakukan "kompromi historis" dengan Kemalis. Kemalis adalah orang-orang yang mendukung sekularisme Kemal Ataturk. Hal ini terjadi karena kelompok terakhir ini, termasuk militer yang melindungi sekularisme Turki, mulai mengadopsi demokrasi dan menjadi lebih terbuka terhadap ekonomi global. Yavuz percaya bahwa faktor-faktor yang disebutkan di atas membuat AKP lebih disukai oleh orang non-Islamis, termasuk orang borjuis. Para politisi Masyarakat Eropa tidak lagi mencurigai mereka di luar negeri yang akan sangat berpengaruh pada masa depan ekonomi Turki. (Annison, 2011).

Karena itu, baik secara sadar maupun terpaksa, kader-kader AKP mulai melakukan perubahan besar menuju demokratisasi, yang pada akhirnya membuat kelompok militer lebih lemah secara institusional. Akibatnya, identitas partai AKP berubah dari radikal ke moderat. Sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti apakah itu taktik atau nyata. Dalam beberapa dekade terakhir, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turki telah mengalami kebangkitan yang sangat besar, yang telah mengubah lanskap politik negara tersebut. Para pengamat politik di seluruh dunia telah memperhatikan kemenangan telak AKP dalam berbagai pemilihan umum. sebagai pemenang dalam pemilu 2002 dan 2007. (Idris, 2016).

Yavuz mengatakan faktor kebangkitan AKP sebagai berikut:

1. Hilangnya kepercayaan kepada patrai terdahulu serta kemiskinan yang melanda pada tahun 2001

Pada tahun 2001 hilangnya kepercayaan masyarakat turki kepada partai terdahulu, dimana masyarakat turki mengalami inflasi dan Tingkat pengangguran yang semakin pesat serta turunnya mata uang turki. Ketika itu partai AKP muncul dengan menjanjikan angin segar untuk masyarakat turki dalam segi ekonomi, reformasi, dan pemerintahan yang bersih, ini menjadi sorotan dimata masyarakat turki, dimana ingi memiliki perubahan dengan adanya partai AKP.

2. Media partai yang mengedepankan demokrasi dan reformasi

Partai AKP juga memperkenalkan kepada masyarakat turki bahwasannya partai AKP merupakan partai politik yang demokrasi yang diartikan sebagai sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, dan juga reformasi

yang diartikan sebagai perubahan ekonomi, ini menjadi perbedaan yang signifikan dari partai-partai sebelumnya yang dimana partai dahulu hanya berfokus pada ideologi agama dan cenderung sebagai partai moderat. AKP pun menarik dukungan yang sangat luas terhadap masyarakat turki.

3. Terkenalnya Recep Tayyip Erdogan

Pemimpin AKP ialah merupakan mantan walikota Istanbul yaitu Recep Tayyip Erdoğan yang dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, dan religious, Erdogan juga berhasil meningkatkan kualitas kehidupan warga melalui infrastruktur dan layanan public. Dengan adanya latar belakang yang baik dan nyaris sempurna Erdogan memainkan peran penting dalam mengonsolidasikan dukungan terhadap partai AKP. (Annison, 2011). Karena itu, baik secara sadar maupun terpaksa, kader-kader AKP mulai melakukan perubahan besar menuju demokratisasi, yang pada akhirnya membuat kelompok militer lebih lemah secara institusional. Akibatnya, identitas partai AKP berubah dari radikal ke moderat. Sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti apakah itu taktik atau nyata.

Dampak AKP Terhadap Islam Politik dan Sekularisme

Partai AKP didirikan pada tanggal 1 Agustus 2001 oleh para reformis yang mengaku sebagai demokrat konservatif. Selama prosesnya, Partai AKP terus menghadapi konflik unik dengan kelompok sekularis. (Othman, M. R, 2015)

Pada pemilihan umum tahun 2002 membawa transformasi baru ke negara ini. AKP menang dalam pemilihan mutlak dengan memperoleh 340 kursi dari total 550 kursi di parlemen. Hal ini menyebabkan militer menjadi kurang penting dalam politik Turki, yang merupakan bagian dari ideologi Ataturk. Studi ini mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana partai AKP mempengaruhi identitas negara Turki dari tahun 2002 hingga 2018. Penulis berpendapat bahwa kemenangan Partai AKP pada pemilihan umum Turki tahun 2002 memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi domestik negara, yang menghasilkan kemenangan AKP kembali di pemilihan umum selanjutnya.

Perubahan yang dilakukan AKP pada politik domestik Turki juga berdampak pada politik internasional Turki, yang menghasilkan identitas baru Turki. Identitas negara berubah selama dominasi partai AKP, yang menggambarkan dirinya sebagai partai konservatif demokratis, yang berdampak besar pada masyarakat dan elit politik. Akibatnya, identitas baru Turki adalah negara yang lebih demokratis tetapi konservatif, menghilangkan dominasi sekularisme yang telah ada sejak 1923. Selain itu, hal itu memengaruhi kebijakan domestik dan internasional, yang akhirnya menciptakan identitas baru Turki. (Haryanto et al., 2013)

AKP telah memainkan peran penting dalam mengubah politik Islam Turki. AKP berhasil mempromosikan Islam moderat, menormalisasi peran Islam dalam politik, dan memberi kelompok Islam ruang gerak yang lebih luas. Namun, kebangkitan AKP juga menimbulkan masalah dengan sistem sekularisme Turki yang sudah lama ada.

Kebangkitan AKP terhadap Islam politik dan sekularisme di Turki memiliki konsekuensi yang belum diketahui. Dinamika internal partai, tekanan dari oposisi, dan perubahan kondisi regional adalah beberapa faktor yang akan memengaruhi dinamika politik di masa depan. (Recep. E, 2018)

AKP dan otoritarianisme

Otoritarianisme merupakan pemerintahan yang dimana mementingkan kekuasaan pada satu pihak, individu, kelompok ataupun partai. Pada sistem politik otoritarianisme biasanya dalam melakukan mekanismenya tidak melalui pengawasan atau pembatasan yang afektif, seperti menguasai sendiri atau independensi. (Margiansyah, 2022)

Partai keadilan dan Pembangunan (AKP) mulai berkuasa sejak 2002 tepatnya diturki, partai AKP dikenal sebagai partai yang konservatif dan demokratis, yang dimana perpolitikan disepakati bersana rakyat itu sendiri. ini menjadi perubahan dalam perpolitikan di turki pada saat itu. (Yusa' Farchan, 2022)

Namun, dibawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan sejak pertengahan 2010-an Partai keadilan dan Pembangunan (AKP) ini menunjukkan kecenderungannya terhadap otoritarianisme, perubannya meliputi:

1. Kekuasaan Terpusat

Pada masa kepemimpinan Erdogan politik diturki berubah sangat jauh. Dimana pada pemerintahan Erdogan hampir semua kekuasaan eksekutif di tangan Erdogan yang berarti mengurangi demokrasi checks and balances di turki pada waktu itu. (Dogan, 2018)

2. Pembatasan awak media kritis

Pada kepemimpinan akp Lembaga awak media memiliki penurunan terhadap kebebasan berkeritik, tak sedikit jurnalis dipenjara dengan tuduhan "mengina presiden" atau "mendukung terorisme" apabila mengkritik kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu turki pun mendapat penurunan awak media kritis, karena banyaknya media independent pada masa itu. (Tri S, 2018)

3. Intimidasi Kaum Minoritas

Pada tahun 2016 dimana akp mengambil tindak tegas kepada partai-partai oposisi. kala itu pemerintah menuduh partai demokrat rakyat (HDP) yang dinggap mewakili etnis kurdi, mendukung terorisme. Dengan adanya hal tersebut dilihat sebagai langkah otoriter untuk mengalahkan lawan partai AKP.

4. Penyalahgunaan agama

Partai AKP juga menggunakan nilai nilai islam sebagai strategi politiknya, serta menghubungkan nilai dasar partai dengan simbol agama dan tradisi masyarakat, trik ini dilakukan partai AKP untuk melawan orang orang yang tidak sepaham. (Deniz et al., 2021)

Dalam pembahasan ini, temuan mengenai kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki menunjukkan bahwa dukungan terbesar AKP

berasal dari para imigran baru di daerah perkotaan, yang cenderung konservatif dan tidak tertarik pada partai sekuler. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa AKP berhasil memanfaatkan infrastruktur lokal dan jaringan sosial yang telah dibangun oleh Partai Kesejahteraan untuk memperluas dukungan di kalangan masyarakat miskin

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya konteks sosial dan ekonomi dalam memahami keberhasilan politik AKP, yang juga didukung oleh analisis Yavuz mengenai munculnya kelas menengah Islamis yang berperan dalam transformasi politik Turki. Lebih lanjut, AKP mengklaim dirinya sebagai partai konservatif demokrat dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.

Pernyataan Erdogan bahwa AKP mewakili gaya politik baru di Turki mencerminkan upaya partai untuk menjangkau berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Idik Saeful Bahri yang menekankan bahwa ideologi konservatif demokrat AKP berfungsi sebagai jembatan untuk menarik dukungan luas dari masyarakat. Namun, meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini juga menunjukkan adanya pergeseran dalam identitas partai AKP dari radikal menjadi moderat, yang dapat diperdebatkan sebagai taktik politik atau perubahan yang tulus. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun AKP berhasil mempromosikan Islam moderat dan memberi ruang bagi kelompok Islam dalam politik, kebangkitan partai ini juga menimbulkan tantangan bagi sistem sekularisme yang telah ada di Turki.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa AKP telah mengubah lanskap politik Turki, tetapi juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai dampak jangka panjang dari kebangkitan AKP terhadap demokrasi dan sekularisme di negara tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun AKP telah berhasil menarik dukungan luas, tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan sekularisme tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam analisis politik Turki ke depan.

SIMPULAN

Kesimpulan, kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama pertumbuhan ekonomi dan dukungan dari kalangan konservatif. AKP berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip sekularisme. Namun, di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, partai ini menunjukkan kecenderungan otoriter dengan membatasi kebebasan sipil dan melemahkan institusi demokrasi. Fenomena ini mencerminkan dinamika politik Turki yang kompleks, di mana faktor ekonomi, agama, dan demokrasi saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh dan pendekatan yang seimbang sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Turki.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, A. M. (2014). Fenomena Recep Tayyip Erdogan dan kepolitikan AKP di Turki. *Jurnal Politika*, 10(1),
- Amin, A. M. (2014). Pengaruh *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) dalam transformasi peta politik di Turki. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 4(1), 137-182.
- Annison, H. (2011). Book review. *Criminology & Criminal Justice*, 11(3), 277-278.
- Deniz, P., Karahasan, B. C., & Pinar, M. (2021). Determinants of regional distribution of AKP votes: Analysis of post-2002 parliamentary elections. *Regional Science Policy and Practice*, 13(2), 323-352. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12321>
- Dogan, R. (2018). Political Islam (*The Justice and Development Party in Turkey*) versus the Gülen Movement. *Journal of Social Science Studies*, 5(2), 89-102. <https://doi.org/10.5296/jsss.v5i2.13048>
- Haryanto, A., Maulida, S. I., & Darmawan, A. B. (2013). Pengaruh partai AKP terhadap identitas negara Turki pada masa kepemimpinan Erdogan. *Global Strategies*, (2), 93-108.
- Heriono, M. J. (2024). Analisis kebijakan kontra terorisme Turki terhadap pemberontakan PKK (2015-2020) ditinjau dari *Counterinsurgency Theory*. *Ayan*, 15(1), 37-48.
- Idik, S. B. (2020). *Turki dalam pergumulan politik, HAM, dan demokrasi* (pp. 48-49). [Penerbit tidak disebutkan].
- Margiansyah, D. (2022). Otokratisasi dan populisme otoriter dalam rezim demokrasi: Perbandingan antara India, Hongaria, dan Turki. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(2), 263-300. <https://doi.org/10.33366/jispo.v11i2.2825>
- Mujani, W. K., & Ibrahim, M. K. (2020). The identity of Turkey's *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) at the crossroads: Islamic or secular party? *International Journal of Islamic Thought*, 18, 131-144. <https://doi.org/10.24035/ijit.18.2020.168>
- Rosyad, L. A., Sahide, A., & Kajian Timur Tengah. (2022). *Post Islamisme: Telaah politik Turki modern era Erdogan*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 12(1), 49-60.
- Syhadha, F. (2019). Institusionalisasi politik Islam di Turki: Studi terhadap kiprah politik Erdogan dalam memperjuangkan Islam. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 79-97.
- Tri, S. A. (2018). Politik Islam di Indonesia antara sakralisasi dan sekularisasi. *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, 13(1). <https://doi.org>
- Yusa' Farchan. (2022). Dinamika sistem politik otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152-161.